

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK SUGAPA KABUPATEN INTAN JAYA

Zulfikar Bintang¹⁾, Nur Aedah²⁾

¹⁾ Mahasiswa Pascasarjana Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

²⁾ Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

Abstract :

The issue of village development has become a priority for realizing development from the lowest level of government. Particularly in poverty alleviation priorities of rural communities. One of the activities aimed at building and prospering the village community is contained in Law No. 6 of 2014 on the Village, which is the activities of BUMDes. This research is conducted to know the implementation of the policy of BUMDes in Sugapa District Intan Jaya Regency. The correct management and implementation and in accordance with the policies made are expected to realize the ideals of BUMDes establishment. This research uses qualitative descriptive writing method. The data source used is primary data and secondary data. The study used the data obtained through interview, bservation and documentation. The theoretical basis used is the theory of policy implementation of Van Meter and Van Horn explains that policy implementation is an action to transform policy into action that is operational by government or private that directed to reach the purpose which have been determined. There are 6 variables of policy implementation according to Van Meter and Van Horn are Policy Objectives, Resources, Inter-Organizational Relations, Characteristics of implementing agencies/ organizations, Political, social and economic environment, Disposition/ response or attitude of the implementers. The process of policy Implementation BUMDes Sejahtera Sugapa District can run smoothly. The achievement of BUMDes welfare mission-mission can be realized. The resources of the marine can be well explored. The relationship between supervisors, administrators and members of BUMDes is conducive. The political, social and economic sectors can thrive. It is based on the level of understanding of the very high actors of economic development and poverty alleviation in Sugapa District. Neither the Village Government nor the managers of BUMDes Sejahtera.

Abstrak :

Isu pembangunan Desa menjadi hal yang diprioritaskan untuk mewujudkan pembangunan dari tataran pemerintahan paling bawah. Khususnya dalam prioritas pengentasan kemiskinan masyarakat pedesaan. Salah satu kegiatan yang ditujukan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Desa tertuang dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Pengelolaan atau implementasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat diharapkan mampu mewujudkan cita-cita pendirian BUMDes. Penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakam adalah data primer dan data sekunder. Penelitian menggunakan data-data yang didapat melalui wawancara, bservasi dan dokumentasi. Landasan teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan untuk mentranformasikan kebijakan menjadi tindakan yang bersifat operasional oleh pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada 6 variabel implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. a). Tujuan Kebijakan b). Sumberdaya, c). Hubungan Inter-Organisasional, d). Karakteristik Lembaga/organisasi pelaksana, e). Lingkungan politik, sosial dan ekonomi, f). Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana. Proses imlementasi kebijakan BUMDes Sejahtera Distrik Sugapa dapat berjalan lancar. Pencapaian visis-misi BUMDes sejahtera dapat terwujud. Sumberdaya pertanian dapat tereksplorasi dengan baik. Hubungan antara pengawas, pengurus dan anggota BUMDes berjalan kondusif. Sektor politik, sosial dan ekonomi dapat berkembang pesat. Hal itu didasari oleh tingkat pemahaman para aktor yang sangat tinggi akan perkembangan perekonomian dan pengentasan kemiskinan di Distrik Sugapa. Baik pihak Pemerintah Desa maupun pihak pengurus pengelola BUMDes Sejahtera.

Keyword: BUMDes, Policy Implementation, Village Government

PENDAHULUAN

Manusia tidak bisa lepas dari pekerjaan. Manusia diciptakan oleh Tuhan bukan saja sebagai hiasan, tetapi sebagai suatu ciptaan yang diberikan tugas. Tugasnya tak lain adalah memelihara ciptaan-Nya ini dengan pekerjaan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan pilihan yang memiliki arti strategis bagi bangsa ini. Karena cita-cita pembangunan harus berlangsung lama, berkesinambungan, dan dinamis, serta mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena kejayaan bangsa Indonesia dimasa depan sangat ditentukan oleh perkembangan dan kualitas sumber daya manusianya. (Syamsuddin, 2002:155).

Harus diakui bangsa Indonesia masih menghadapi masalah mendasar tentang kualitas sumber daya manusia (SDM). Secara umum kehidupan kita masih diliputi lemahnya kualitas pengalaman disiplin nasional dan etos kerja. Dalam hal ini seorang manusia modern yang maju adalah yang cenderung merealisasikan segala cita, rasa, dan karsanya kedalam karya nyata. Oleh karena itu tuntutan akan kemajuan manusia Indonesia semakin mendesak. (Syamsuddin, 2002:155).

Pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang diharapkan unggul dan berkualitas terutama bidang ekonomi, politik, dan budaya. Dewasa ini perjuangan tidak hanya dalam satu negara. Antara satu kelompok berkuasa (minoritas) dan kelompok mayoritas (masyarakat secara umum), melainkan sudah mencapai antar negara dan bangsa. Karena itu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting. Sehingga kehidupan bangsa di tengah-tengah berlangsungnya kemajuan peradaban, masyarakat Indonesia mampu mengimbanginya. (Supartini, 2012).

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Mandiri berarti masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya (baik secara

individu ataupun kolektif) melalui usaha yang dilakukan dan tidak bergantung pada yang lain. Jaringan kerja merupakan kerangka kerjasama yang dilakukan oleh *stakeholder* yaitu pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat sehingga pembangunan tidak merugikan pihak manapun dan dapat memberikan hasil yang merata yang merupakan konsep keadilan (kesejahteraan yang merata). Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan semua pihak yang berkaitan termasuk masyarakat itu sendiri. Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut merencanakan, melaksanakan, dan menilai. Strategi pembangunan meletakkan partisipasi masyarakat sebagai fokus isu sentral pembangunan sementara itu strategi pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian (Hikmat, 2010:21)

Dalam gagasan pembangunan wilayah lokal, wilayah lokal digambarkan sebagai komponen fundamental masyarakat yang ada di dalam batas-batas geologis tertentu di mana mereka dapat membina komunikasi sosial dengan jaminan mental satu sama lain dan dengan tempat tinggal mereka. Ada tiga metodologi dalam pembangunan daerah, yaitu pembangunan diri khusus, pendekatan perjuangan, dan bantuan khusus (Ilham, dkk, 2020; Suparlan & Suyatno, 2003; Abimanyu, 1988).

Dalam kajian pemberdayaan masyarakat, para ahli sosiologi lebih suka menggunakan istilah pengembangan wilayah lokal yang bersifat dasar daripada pembangunan wilayah lokal yang pada umumnya akan bersifat hirarkis untuk mengartikan kata pembangunan wilayah lokal.

Kemajuan daerah merupakan gerakan perbaikan yang disusun secara berkelompok. Kebutuhan untuk perbaikan individu adalah bagian dari ekuitas, keseimbangan aset normal dan kepentingan wilayah lokal. Dalam situasi yang begitu unik, kemajuan adalah pembangunan daerah, seluruh daerah, bukan proyek administrasi yang dilakukan oleh individu

di bawahnya. Kemajuan adalah siklus di mana individu dari masyarakat umum meningkatkan kemampuan individu dan institusional mereka untuk mengumpulkan dan mengawasi aset untuk menciptakan peningkatan yang dapat didukung dan adil dalam kepuasan pribadi seperti yang ditunjukkan oleh tujuan mereka sendiri.

Aspek ekonomi merupakan salah satu ukuran yang penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu wilayah pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang merupakan tujuan pembangunan, selain harus dicapai dengan pertumbuhan aspek ekonomi yang tinggi juga diperlukan pembangunan lainnya yang merata.

Pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian serta keadilan sosial dan meningkatkan demokrasi lokal yang sudah tumbuh. Pelaksanaan undang-undang desa sebenarnya memberi peluang kepada Masyarakat Distrik Sugapa untuk membangun kembali desa yang sudah lama tidak membangun dirinya sendiri.

Sebagai lokasi dalam penelitian ini dilakukan penelitian pada Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya sebagai suatu wilayah pegunungan maka pembangunan di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya belum sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dalam pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian serta

keadilan sosial dan meningkatkan demokrasi lokal yang sudah tumbuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian adalah Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Kegiatan Pembangunan di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya, dan Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Kegiatan Pembangunan di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya didasari atas pertimbangan bahwa permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Intan Jaya.

Informan penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Intan Jaya, Kepala Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Masyarakat yang memberikan informasi mengenai pemberdayaan masyarakat Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Jenis dan sumber data adalah data sukender dan data primer, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Termasuk pula sebagai sumber data sekunder adalah sumber data yang didapat dari studi pustaka (Arikunto, 2002).

Teknik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa literatur hasil penelitian ilmiah, dan penelitian lapangan yaitu dengan cara observasi dan wawancara (Sugiyono, 2018). Teknik analisis data adalah Tahapan analisa tersebut Miles dan Huberman dalam Moleong (2006:287) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mendukung Kegiatan Pembangunan Di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya

Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan data bahwa sejak berlakunya keputusan pemerintah dalam program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat terbukti dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada di Distrik Sugapa, walaupun harus diakui seutuhnya penurunan angka kemiskinan tidak hanya karena adanya program pemberdayaan. Berikut ulasan mengenai penelitian di lapangan yang berfokus pada implementasi keijakan program pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005; Nugroho, 2009; Wahab, 2001; Wibowo, 1994) disebut dengan *A Model of the Policy Implementation (1975)*. Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan, Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada dilevel peleksana kebijakan.
- 2) Sumber Daya, Keberhasialan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- 3) Karakteristik organisasi pelaksana, Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan.

- 4) Disposisi atau sikap para pelaksana, Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.
- 5) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 2007; Agustino, 2008) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*).

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik.

Standar dan Tujuan Kebijakan

Tujuan Kebijakan BUMDes dengan Standar yang jelas dalam hal kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya, Dapat diketahui bahwa tujuan BUMDes Sejahtera disusun melalui hasil yang telah disepakati dalam musyawarah penderiaan awal BUMDes. Adapun tujuan BUMDes Sejahtera kemudian diwujudkan melalui visi dan misi, hal tersebut sebagaimana termuat dalam buku profil BUMDes Sejahtera.

Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Jika dilihat dari segi kebijakan yang tercantumkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Impelemntasi pengelolaan keuangan bagi kesejahteraan anggota dan pengurus tersebut menunjukkan adanya kerukunan dalam bermasyarakat.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan

organisasi informal. Proses yang demokratis dan transparan diharapkan mampu membawa BUMDes Sejahtera ke arah kejayaan. Adanya rasa saling memiliki terhadap BUMDes. Selain itu, tugas pengurus inti hanya sebagai pengontrol proses berlangsungnya implementasi sampai tingkat bawah.

Sikap Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Pelaksana kebijakan dari level pemerintah desa telah memberikan gambaran yang sepaham dengan apa yang menjadi amanat undang-undang terkait pendirian BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Disisi lain, substansi Hukum UU Desa memberikan keleluasaan jenis usaha yang akan dikelola oleh BUMDes.

Komunikasi antar Organisasi terkait dan Kegiatan Pelaksana

Hubungan antara Pengurus, Badan Pengawas dan Kelompok Masyarakat dalam koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Tentunya lembaga BUMDes memiliki sistem kontrol yang jelas, pernyataan diatas menjelaskan bahwasannya fungsi dan Peran Badan pengawas merupakan hal yang sangat vital. Semua lembaga yang berbentuk apapun membutuhkan sistem kontroling.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal lain yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. BUMDes dapat dimanfaatkan sebagai Pembangunan Desa. Selain itu, dapat juga dimanfaatkan untuk pemberdayaan Masyarakat Distrik Sugapa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sebagai mana kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh BUMDes Sejahtera Distrik Sugapa.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mendukung Kegiatan Pembangunan Di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya

Faktor Internal

Mampu melihat peluang usaha yang akan dijalankan merupakan keputusan yang vital. Karena apabila pemerintah desa dan pengelola BUMDES salah memahami potensi dan juga peluangnya, maka akan banyak BUMDES tidak berjalan. Potensi Desa memiliki arti yang luas tidak hanya berfokus pada potensi lokal seperti pertanian dan perkebunan. Sering kali pemerintah desa kurang peka akan potensi lokal yang desa mereka miliki, dan tidak mengikut sertakan masyarakat untuk memetakan kondisi yang ada di Distrik Sugapa. Untuk mendirikan BUMDES dibutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan juga kompetensi yang baik dalam bidang usaha. Hal ini untuk mendukung berjalannya BUMDES secara maksimal. BUMDES Sejahtera yang dilakukan pemerintah desa beserta pengurus BUMDES dengan mengelola potensi lokal yang ada di Distrik Sugapa menjadi suatu usaha yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berdampak pada adanya pergerakan ekonomi desa.

Faktor Eksternal

Salah satu yang masih belum terlihat dari pengembangan BUMDES Sejahtera pengelola belum memiliki jaringan sosial yang baik Salah satu contoh jaringannya yaitu mempunyai jaringan dengan pihak lembaga pemerintah. Sebagaimana jaringan ini berfungsi untuk memberikan kemudahan akses terhadap bermacam sumberdaya langka seperti informasi dan kekuasaan. Tujuan dari pendirian BUMDES adalah peningkatan ekonomi desa melalui pendapatan asli desa.

Masuknya pendapatan asli desa ke Kas desa memberikan kontribusi sebagai pembangunan desa mandiri yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Masyarakat Distrik Sugapa sehingga tidak hanya bergantung pada dana desa. Walaupun belum menghasilkan pendapatan asli desa yang bernilai tinggi, namun hingga saat ini pengelola BUMDES Sejahtera berusaha untuk meningkatkan pelayanan yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat program BUMDes dalam mendukung kegiatan pembangunan di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya, temuan yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan.

Dapat diketahui dengan pendekatan implementasi Kebijakan yang di sampaikan oleh Van Meter dan Van Horn, hal tersebut dapat diketahui melalui temuan masalah dimana proses implementasi kebijakan pada BUMDes Sejahtera dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. *Pertama*, tujuan pendirian BUMDes sejahtera dijelaskan dalam Buku Profil BUMDes Sejahtera. Dijabarkan melalui 5 poin yang sangat jelas. Sehingga kejelasan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik oleh pengurus dan seluruh anggota BUMDes Sejahtera. *Kedua*, pemanfaatan sumberdaya yang tersedia menjadi sebuah hal vital dalam proses implementasi kebijakan. Baik sumberdaya materiil maupun sumberdaya alam maupun manusia. *Ketiga*, proses implementasi kebijakan publik membutuhkan sebuah mekanisme koordinasi dan komunikasi yang baik antar semua pelaku. Keterbukaan, koordinasi dan komunikasi ini yang kemudian membangun kepercayaan antar pihak yang begitu baik. *Keempat*, ada banyak hal yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Dukungan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dalam setiap

kebijakan yang dihasilkan oleh pengurus BUMDes. *Kelima*, kondisi politik, sosial dan ekonomi juga menjadi hal penting dalam proses berlangsungnya implementasi kebijakan. Pembuatan program yang tepat mampu membangkitkan gairah masyarakat untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Hal tersebut terbukti dari jumlah anggota BUMDes yang begitu banyak. *Keenam*, pemahaman terhadap sebuah makna suatu kebijakan sering kali menjadi kendala dalam sebuah implementasi kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakannya juga berjalan sukses. Hal itu terlihat dari bagaimana pengurus dengan benar mengelola dan mengalokasikan anggaran dengan baik dan sesuai dengan sasaran.

Adapun Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan. Faktor secara internal adalah *Pertama*, Pengelola BUMDES Sejahtera dan juga Pemerintah Desa mampu melihat peluang usaha yang akan dijalankan. Yang mana ini didukung pula dengan potensi sumberdaya alam yang dapat dikembangkan menjadi unit usaha BUMDES. *Kedua*, Selanjutnya juga dengan adanya respon positif dari masyarakat terhadap unit usaha yang dijalankan BUMDES, menjadikan pengelola BUMDES bersemangat untuk terus melakukan pengembangan unit usaha yang dijalankan. *Ketiga*, Terakhir dukungan pemerintah daerah juga berjasa terhadap pendukung keberadaan BUMDES Sejahtera.

Faktor secara eksternal adalah *Pertama*, selain didapati pula faktor eksternal dalam menjalankan unit usaha BUMDES Sejahtera seperti dalam menjalankan usahanya BUMDES Sejahtera tidak terlepas dari minimnya modal yang digunakan hal ini menyebabkan beberapa unit usaha yang sudah dijalankan harus dihentikan. Dalam menjalankan BUMDES dibutuhkan pula orang-orang yang memiliki kemampuan menjalankan usaha dan juga berkompetensi baik secara manajerial, hal ini pula yang masih menjadi tugas para pengelola dalam masalah internalnya. Hal ini disebabkan dari kurang adanya elaborasi jaringan sosial antara

BUMDES dengan pihak eksternal. *Kedua*, Menyebabkan pengelola mengalami kesulitan dan menghabiskan dana yang besar untuk mendapatkan surat ijin operasional unit usahanya. Selain itu juga, BUMDES kurang mendapat sorotan dari masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai pihak ketiga guna membangun kerjasama usaha masyarakat agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat

melaksanakan kegiatan yang menunjang peningkatan SDM, baik SDM pengelola maupun masyarakat untuk kegiatan pendampingan dan pemberdayaan agar dapat menjamin keberlanjutan usaha, dan mekanisme pengelolaan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan BUMDes diharapkan untuk senantiasa

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. (1998). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*. Yogyakarta: PAU-SE UGM & BPFE.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. CV Alfabeta: Bandung.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian. Suatu pendekatan praktek*. Jakarta: rineka cipta.
- Hikmat, H. (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Ilham, I., Muttaqin, U. I., & Idris, U. (2020). Pengembangan Bumkam Berbasis Potensi Lokal Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 104-109.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya : Bandung.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparjan & Suyatno, H. (2003). *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya media.
- Supartini. (2012). 'Pemberdayaan Masyarakat melalui Potensi Desa Wisata Ketingen Kabupaten Sleman di Yogyakarta'. Dalam *Jurnal Nasional Pariwisata*. No. 1. Hal. 57-71.
- Syamsuddin, M. D. (2002). *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Ciputat : Wacana Ilmu.
- Wahab, S. A. (2001). *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Wibowo, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta, PT.Grafindo Persada.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia. Malang.